



DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Alamat: Jl. Abdul Muis No. 2-4, Jakarta Pusat, Email: tudkpp@dkpp.go.id

www.dkpp.go.id [f](https://www.facebook.com/medsosdkpp) [i](https://www.instagram.com/dkpp_ri) [X](https://www.tiktok.com/@DKPP_RI) [@DKPP_RI](https://www.youtube.com/DKPP_RI) [DKPP RI](https://www.youtube.com/DKPP_RI) [Call Centre 1500101](https://www.youtube.com/DKPP_RI)

RILIS PERS

DKPP MELUNCURKAN HASIL INDEKS KEPATUHAN ETIK PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM (IKEPP) TINGKAT NASIONAL TAHUN 2024

ETIKA KPU – BAWASLU PATUH TAPI BELUM AMAN

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) meluncurkan Indeks Kepatuhan Etik Penyelenggara Pemilu (IKEPP) di Jakarta pada Kamis (30/1/2025). "IKEPP merupakan inovasi DKPP dalam mengukur kualitas dan integritas Penyelenggara Pemilu sebagai wujud sinergitas dengan Indeks Demokrasi Indonesia," ujar Ketua DKPP, Heddy Lugito.

Ketua DKPP menambahkan bahwa hasil-hasil penelitian dalam kerangka IKEPP dapat dijadikan acuan para pengelola lembaga penyelenggara Pemilu untuk memperbaiki kinerja perilaku baik ucapan maupun tindakan. Indeks tersebut juga dapat dijadikan sebagai bahan rujukan untuk pembinaan, perbaikan cara kerja, dan membangun habituasi lingkungan yang patuh terhadap kode etik penyelenggara Pemilu.

"Intinya, IKEPP disusun sebagai instrumen penilaian dan pemeringkatan yang akuntabel untuk menjaga kemandirian, integritas, dan kredibilitas Penyelenggara Pemilu sebagaimana amanat Undang-Undang Pemilu," Heddy Lugito menambahkan.

Selain itu, kehadiran IKEPP, menurut Heddy Lugito, juga untuk mempermudah proses penyusunan strategi pembangunan bangsa di bidang etika politik kepemiluan, dengan mengintegrasikan ke dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. "Peluncuran IKEPP menunjukkan keberadaan DKPP sebagai lembaga yang memonitor kepatuhan penyelenggara Pemilu atas kode etik kepemiluan. Tujuannya agar para penyelenggara Pemilu di Indonesia bisa lebih berhati-hati dalam menjalankan tugasnya dengan adanya indikator dari IKEPP ini," pungkasnya.

Dengan mengukur skala kepatuhan etik, IKEPP bertujuan untuk memberi pemeringkatan (rating) sejauh mana perilaku jajaran KPU dan Bawaslu di level pusat dan provinsi mematuhi kode etik penyelenggara Pemilu dalam rangkaian Pemilu 2024. Untuk sementara, cakupan penilaian IKEPP 2024 adalah KPU dan Bawaslu di tingkat Pusat dan di tingkat provinsi se-Indonesia. Pada Pemilu-Pemilu berikutnya, IKEPP akan dikembangkan hingga ke tingkat kabupaten/kota.

Penilaian dalam Menyusun IKEPP 2024 meliputi tiga dimensi. Yaitu, dimensi Persepsi atas Perilaku Etik (PPE), dimensi Eviden Perilaku Etik (EPE), dan dimensi Pelembagaan Etik Internal (PEI).

Dimensi PPE dilihat dari integritas serta profesionalitas Penyelenggara Pemilu. Dimensi EPE terdiri dari penanganan pengaduan serta tinggi rendahnya pengaduan publik. Dan terakhir, dimensi PEI diukur dari parameter aturan pencegahan, program pembinaan serta kepatuhan terhadap keputusan/putusan.

Skor yang diberikan untuk penilaian etik pada masing-masing dimensi, terbagi dalam lima indikator. Yaitu indikator sangat tidak patuh (0,0-20,0), tidak patuh (20,1-40,0), cukup patuh (40,1-60,0), patuh (60,1 – 80,0), dan sangat patuh etik (80,1-100,0).

Tim Peneliti dan Penyusun IKEPP 2024 diketuai oleh Dr. Nur Hidyat Sardini, S.Sos., S.H., M.Si. Tim telah bekerja sejak awal hingga akhir tahun 2024 melalui sejumlah tahapan, baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif.

IKEPP Tingkat Nasional Tahun 2024

Merupakan penilaian gabungan antara IKEPP KPU – Bawaslu Provinsi se-Indonesia dengan IKEPP KPU – Bawaslu RI dengan nilai keseluruhan 61,72. Terdiri dari dimensi eviden perilaku etik (58,45), persepsi atas perilaku etik (77,86), dan pelembagaan etik internal (56,23).

Penilaian tersebut menunjukkan persepsi publik mengkategorikan perilaku etik penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu) masuk pada kategori patuh. Namun dari eviden etik (data persidangan DKPP) pelembagaan etik internal sekretariat KPU dan Bawaslu justru jauh lebih rendah (cukup patuh).

Artinya, IKEPP Tingkat Nasional 2024 dikategorikan patuh namun belum aman. Hal ini dikarenakan rendahnya penilaian dimensi pelembagaan etik KPU dan Bawaslu Provinsi masing-masing 52,73 dan 47,90. Kemudian eviden perilaku etik KPU dan Bawaslu RI (30,83 dan 33,61) masih sangat rendah. Kemudian masih rendahnya penilaian eviden perilaku etik KPU provinsi sebesar 66,81.

Secara garis besar data kontribusi skor IKEPP Tingkat Nasional di atas menggambarkan kondisi banyaknya kasus-kasus yang dipersidangkan oleh DKPP mempengaruhi tinggi rendahnya skor IKEPP di tingkat nasional maupun skor IKEPP di masing-masing tingkat penyelenggara (KPU dan Bawaslu RI, maupun KPU dan Bawaslu Provinsi).

IKEPP Tingkat Provinsi Tahun 2024

Penilaian IKEPP Tingkat Provinsi secara keseluruhan mencapai angka rata-rata adalah 63,03 (masuk kategori patuh). Dengan rincian sebagai berikut IKEPP KPU Provinsi mencapai 63,26, sedangkan Bawaslu Provinsi mencapai 62,80.

Rincian IKEPP KPU Provinsi dapat digambarkan sebagai berikut: 25 provinsi masuk kategori patuh. Sedangkan 12 provinsi dalam kategori cukup patuh dan satu (1) provinsi yakni KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam kategori sangat patuh.

Sementara itu, IKEPP Bawaslu Provinsi adalah sebagai berikut: 21 provinsi masuk pada kategori patuh, 16 provinsi pada kategori cukup patuh dan satu (1) provinsi yakni KPU Provinsi Banten ada pada kategori sangat patuh.

Provinsi	IKEPP		IKEPP Total
	KPU	BAWASLU	
Aceh	55,7	68,86	62,28
Bali	63,9	65,68	64,79
Bangka Belitung	59,01	71,65	65,33
Banten	48,41	80,11	64,26
Bengkulu	50,04	58,13	54,09
Daerah Istimewa Yogyakarta	76,08	79,36	77,72
DK Jakarta	44,86	47,43	46,14
Gorontalo	66,18	58,97	62,57
Jambi	66,68	66,38	66,53
Jawa Barat	49,53	52,79	51,16
Jawa Tengah	62,79	66,95	64,87
Jawa Timur	70,00	59,52	64,76
Kalimantan Barat	62,67	73,37	68,02
Kalimantan Selatan	65,75	48,96	57,35
Kalimantan Tengah	64,53	79,93	72,23
Kalimantan Timur	59,27	66,75	63,02
Kalimantan Utara	62,57	54,46	58,51
Kepulauan Riau	55,19	53,57	54,38
Lampung	66,98	66,72	66,85
Maluku	66,72	66,52	66,62
Maluku Utara	63,22	67,02	65,12
Nusa Tenggara Barat	61,77	64,23	63,00
Nusa Tenggara Timur	86,51	57,14	71,83
Papua	66,21	66,82	66,52
Papua Barat	57,41	64,61	61,01
Papua Barat Daya	47,13	59,36	53,25
Papua Pegunungan	69,54	63,89	66,71

Provinsi	IKEPP		IKEPP Total
	KPU	BAWASLU	
Papua Tengah	69,68	56,25	62,97
Papua Selatan	67,47	57,1	62,28
Riau	66,04	51,53	58,78
Sulawesi Barat	66,89	65,81	66,35
Sulawesi Selatan	67,95	73,04	70,49
Sulawesi Tengah	68,10	49,30	58,70
Sulawesi Tenggara	78,13	66,09	72,11
Sulawesi Utara	58,71	64,44	61,58
Sumatera Selatan	70,62	59,95	65,29
Sumatera Utara	55,59	48,98	52,29
Sumatera Barat	66,04	64,76	65,41

Sekretaris DKPP,



Dr. Ir. David Yama, M.Sc, MA
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19770606 200112 1 001